

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penguasaan politik lokal oleh para pebisnis sudah lama muncul di Indonesia seiring dengan diberlakukannya Pemilu pertama pada tahun 2005 maupun implementasi otonomi daerah pada tahun 2001. Seiring dengan berjalannya kedua proses tersebut sebagai wujud demokratisasi di aras lokal, berbagai elit bermunculan di daerah khususnya yang berlatarbelakang pengusaha untuk mengkooptasi kedua proses tersebut. Kemunculan para elit dalam demokrasi lokal tersebut lazim dikenal dalam istilah reorganisasi kekuasaan. Reorganisasi ini diartikan sebagai kembalinya pengaruh kekuasaan politik elit lokal ke dalam era demokrasi. Selama Orde Baru berkuasa, kekuasaan para elit ini dibatasi oleh pusat yang lebih cenderung pada mekanisme pengangkatan maupun penunjukan langsung. Hal inilah yang membuat elit lokal terbelah menjadi dua, yakni sebagai pelayan Orde Baru sehingga mendapatkan keistimewaan politik dan elit lokal penentang yang tidak menyukai kepemimpinan Orde Baru sehingga tersingkir dalam arena politik lokal di daerahnya.

Momentum transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi yang kemudian ditandai dengan kebijakan otonomi daerah sangat dimanfaatkan oleh kedua kelompok elit untuk berkuasa secara penuh di daerahnya baik berkontestasi untuk menjadi elit pemenang maupun bersinergi satu sama lain yang pada umumnya disatukan melalui jalur perkawinan. Maka

tidaklah mengherankan kemudian otonomi daerah melahirkan adanya raja-raja kecil di daerah. Berkembangnya kekuatan-keuatan politik baru di aras lokal juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk ‘Cendanaisasi’ lokal. Istilah cendanaisasi merujuk pada Keluarga Cendana semasa 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto yang sangat berkuasa dalam ekonomi-politik Indonesia. Semua pos-pos kunci pemerintahan dikuasai anak, menantu, kemenakan, maupun kerabat lainnya, sehingga kekuasaan tersebut menjadi langgeng selama tiga dekade pemerintahan. Pola itulah yang sebenarnya sedang berkembang dan dicontoh oleh para keluarga elit lokal bahwa proses demokrasi lokal bisa ditelikung dengan menempatkan kerabat dalam posisi strategis daerah.

Pengamanan terhadap aset kekayaan menjadi salahsatu alasan pengusaha lokal untuk turun langsung dalam kontestasi politik lokal dan berusaha untuk menjadi pemenangnya. Dengan modal material yang besar para pengusaha lokal berlomba-lomba untuk menjadi kepala daerah atau pemimpin di daerah. sehingga dengan keikutsertaan dalam pemerintahan, kebijakan yang dibuat para elit tersebut dibuat untuk menguntungkan kekayaannya. Hal tersebut yang sudah terjadi di Kabupaten Brebes, dimana terdapat elit lokal yang berlatarbelakang sebagai pebisnis yang menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Brebes dan berusaha untuk mengamankan kekayaannya. Berangkat dari keluarga pebisnis dan mempunyai berbagai macam bisnis yang sudah dijalankan, tidak menutup kemungkinan dengan mengamankan kursi Kepala Daerah maka dapat

mengamankan bisnis atau kekayaan melalui kebijakan yang dibuat. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan berfokus mengenai peran keluarga dalam memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Bupati yang akan menguntungkan bisnis keluarganya.

Relasi bisnis dan politik di aras lokal ditandai dengan terpilihnya pengusaha/pebisnis sebagai Kepala Daerah maupun anggota legislatif daerah. pengusaha/pebisnis memainkan perannya sebagai kepala daerah sekaligus sebagai pemilik perusahaan, dengan mengadakan proyek-proyek maupun melalui kebijakan yang ia buat untuk memperkaya diri ataupun keluarganya. Hal tersebut pernah terjadi di Provinsi Banten yang pada saat itu di pimpin oleh Ratu Atut. Pada saat menjadi Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut setidaknya menguasai sedikitnya 175 proyek pengadaan barang/jasa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi Banten(<https://www.wartaekonomi.co.id/read17956/menguak-bisnis-dinasti-politik-di-banten-ii.html> diakses pada 28 Agustus 2019 Pukul 19.05 WIB). Secara keseluruhan pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Provinsi Banten diduga perusahaan yang dikendalikan langsung oleh Ratu Atut dan jaringannya mendapatkan 175 proyek dengan total nilai kontrak Rp 1.148 Triliun (<https://www.wartaekonomi.co.id/read17956/menguak-bisnis-dinasti-politik-di-banten-ii.html> diakses pada 28 Agustus 2019 Pukul 19.06 WIB). Ada dua modus yang digunakan Ratu Atut untuk mendapatkan proyek pengadaan barang/jasa di Banten, yaitu melalui perusahaan yang dikuasai oleh keluarga Ratu Atut secara langsung ataupun perusahaan lain yang menjadi kartel

Ratu Atut. Hal itu menunjukkan gurita bisnis Ratu Atut menguasai proyek pengadaan barang/jasa yang ada di Banten. Keluarga Ratu Atut menguasai Provinsi Banten dari hulu ke hilir secara sistematis. Mulai dari perencanaan APBD hingga tender proyek pengadaan barang/jasa keluarga Ratu Atut pasti berperan. Mulai dari eksekutif, legislatif dan birokrasi dikuasai oleh keluarga Ratu Atut.

Relasi bisnis dan politik dalam kaitannya untuk memperkaya diri dan keluarganya pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sorotan masyarakat terhadap beberapa beberapa deposan terbesar Bank Century, khususnya Siti Hartati Murdaya dan Boedi Sampoerna, sangat wajar, mengingat besarnya bantuan kedua kelompok bisnis yang mereka pimpin bagi kampanye Partai Demokrat dan calon presidennya. Dukungan ini dimulai oleh Hartati Murdaya menjelang Pemilu 2004 dan semakin meningkat menjelang Pemilu 2009. Pengelola Arena Pekan Raya Jakarta ini berulang kali menyediakan gelanggang promosi bisnisnya sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Partai Demokrat, termasuk Rapimnas Partai Demokrat, 8-9 Februari 2009. Mengenakan jaket biru Partai Demokrat, ia duduk di barisan terdepan, sebaris dengan SBY, Ani Yudhoyono, dan Hadi Utomo. Selanjutnya, dalam tim kampanye SBY-Boediono, Hartati menjadi Wakil Koordinator Operasi I. (George Junus, 2010:76)

Sedangkan dari kelompok Sampoerna, investigasi kami menemukan dukungan dana sebesar Rp 90 milyar kepada kelompok media Jurnal Nasional (Jurnas) yang dekat dengan Partai Demokrat dan SBY sejak 2006

sampai dengan 2009. Di saat itu, injeksi dana ke kelompok Jurnas mulai bergeser ke pengusaha-pengusaha yang dekat dengan keluarga Cikeas, di bawah koordinasi Gatot Mudiantoro Suwondo, yang kebetulan Direktur Utama BNI(George Junus, 2010:76).

Hal yang sama juga sedang terjadi di Kabupaten Brebes. Terdapat satu oligark lokal yang menguasai Pemerintahan yang berlatarbelakang sebagai pengusaha/pebisnis. Dengan modal material oligark ini mampu menempati kursi Kepala daerah Kabupaten Brebes. Berlatar belakang keluarga pebisnis dengan bisnis yang sangat dikenal di masyarakat tegal raya dan mempunyai perusahaan otobus terbesar di Tegal Raya, biasa dikenal PO Dewi Sri. Salah satu dari anggota keluarga Dewi Sri mampu menduduki Kepala Daerah Kabupaten Brebes selama dua periode. Sebelumnya dua anak lainnnya dari keluarga Dewi Sri juga mampu menjadi Kepala Daerah di Kabupaten Pemasang dan Kota Tegal.

PO Dewi Sri sendiri didirikan oleh H. Ismail dan Hj. Rokhayah, yang kemudian perusahaan ini di wariskan oleh anak – anaknya yaitu Idza Priyanti, Ikmal Jaya, dan Mukti Agung Wibowo. Terdapat hal yang menarik perhatian masyarakat dimana, ketiga anaknya mampu menduduki jabatan strategis dengan menjadi kepala daerah di tiga daerah yang berbeda yaitu di Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Pemasang. Hal ini menandakan ada niatan tersendiri dari keluarga besar PO Dewi Sri untuk menguasai daerah Tegal dan sekitarnya dengan menempatkan keluarganya menjadi kepala daerah di Tegal dan sekitarnya. Bisnis keluarga PO Dewi

Sri yang bisa dibilang sukses dibidang transportasi darat lantas tidak memberikan rasa puas terhadap apa yang telah di raih oleh keluarga Dewi Sri. Ketiga anak dari pendiri PO Dewi yang sekaligus menjabat sebagai direktur utama, mengekspansi bisnisnya ke ranah politik lokal. Ekspansi bisnis dengan terjun ke ranah politik yang dilakukan oleh keluarga PO Dewi Sri bisa dikatakan cukup berhasil. Terbukti dengan terpilihnya ketiga anaknya menjadi kepala daerah di Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Pemasang.

Saat ini yang tersisa menduduki jabatan publik dari keluarga Dewi Sri adalah Idza Priyanti, yang menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Brebes. Sekaligus mampu menjabat sebagai Bupati Brebes selama dua periode. Penempatan Idza Priyati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Brebes bukan tanpa alasan. Pasalnya jika dilihat dari bisnis keluarga Dewi Sri di bidang transportasi sedang meredup. Ditambah dengan tersandungnya kasus korupsi oleh Ikmal Jaya pada saat menjabat sebagai Wali Kota Tegal. Idza Priyanti seperti menjadi harapan bagi keluarga Dewi Sri untuk menyelamatkan nama dan sekaligus sebagai pengaman kekuasaan dan pengaruh di Tegal Raya sekaligus sebagai pengaman kekayaan keluarga Dewi Sri. Seperti yang diungkapkan oleh Winters, bahwa alasan oligark tetap dalam kekuasaan adalah untuk mengamankan kekayaannya.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN) yang dirilis KPK pada tahun 2016, menyebutkan bahwa pada saat akan mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Brebes, Idza Priyanti

memiliki kekayaan sebesar Rp 7,67 miliar, yang menjadikan Idza Priyanti sebagai calon Bupati terkaya dibandingkan calon lainnya (<http://brebesnews.co/2016/12/ini-daftar-kekayaan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-brebes/> diakses pada 28 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB). Tidak menutup kemungkinan dengan kekayaan sebesar itu ditambah bisnis keluarga yang sudah menggurita, Idza Priyanti sebagai satu-satunya anggota keluarga Dewi Sri yang masih menjabat sebagai pejabat publik, membuat suatu kebijakan atau mengadakan proyek-proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mengamankan kekayaannya.

Pada saat pencalonan Bu Idza Periode 2017-2022 sebagai Bupati Kabupaten Brebes, memang terdapat dorongan dari keluarga terutama yang paling berperan adalah Pak Warsidin selaku suami. Memang pada saat pencalonan pertamakali pada tahun 2012 terdapat dorongan dari keluarga “Dewi Sri” untuk mendirikan dinasti politik di wilayah Tegal Raya yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal. Tetapi hal tersebut tidak terjadi akibat salahsatu anggota keluarga yaitu Ikmal Jaya yang pada tahun 2009-2014 menjabat sebagai Walikota Kota Tegal terjerat kasus korupsi pada tahun 2013. Pada tahun 2016 Mukti Agung mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Pemalang tetapi gagal. Sehingga dinasti politik Dewi Sri tidak terbangun di wilayah Tegal Raya.

Dari kegagalan yang dialami oleh Mukti Agung di kabupaten Pemalang, ditambah terjeratnya Ikmal Jaya dalam kasus korupsi, membuat

keluarga “Dewi Sri” berusaha memertahankan kekuasaannya di Kabupaten Brebes. Peran keluarga dan dukungan relative besar, ketika Bu Idza bertarung dalam kontestasi Pemilukada Kabupaten Brebes, keluarga “Dewi Sri” termasuk saudara – saudara Bu Idza terlibat langsung dalam membantu memenangkan Pemilukada Kabupaten Brebes baik pada tahun 2012 maupun pada tahun 2017.

“Untuk perkara tersebut, secara personal tentunya ada dorongan keluarga dan menjadi motivasi karena mencalonkan diri sebagai bupati yang tidak mudah dan banyak indikatornya. peran keluarga dan dukungan relatif besar. Jadi ketika beliau bertarung di konstelasi komiti ini, saudara-saudara beliau terlibat langsung membantu beliau dalam memenangkan pemilu baik tahun 2012 maupun 2017 dan itu semuyun di keluarga beliau. Tidak ada batasan antara kakak-adik dan itu memang kompak, dari kekompakan ini berikutnya mempunyai relawan-relawan dari partai maupun relawan pribadi yang bersatu sehingga beliau memenangkan dua periode dan lawannya juga tidak dapat dianggap remeh sebab yang satu berasal dari petahana kemudian yang lain adalah mantan menteri maka itu tidaklah mudah. Kegotongroyongan di keluarga beliau memang kompak karena semuyun dalam kancah politik brebes.”(transkrip wawancara dengan Bu Idza, Bupati Kabupaten Brebes)

Pihak keluarga yang paling berperan besar dalam kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti adalah suaminya sendiri. Suaminya yang merupakan seorang perwira Kepolisian Republik Indonesia sangat berperan besar dalam memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti. Setia kebijakan yang dikeluarkan oleh Idza Priyanti tidak terlepas dari peran serta suaminya dibelakangnya. Banyak dari pernyataan-pernyataan Idza Priyanti mengenai pengampilan keputusan untuk Pemerintah Kabupaten Brebes dikeluarkan oleh suaminya. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Kabupaten Brebes bahwa suami Idza Priyanti yang biasa

disebut “AYAH E” mengendalikan kebijakan di Pemerintahan Kabupaten Brebes saat ini.

“Dugaan mengarah ke pihak suami karena saya rasa memiliki pengaruh yang cukup besar dan kiranya sudah umum strootip bahwa perempuan masih kalah cakap dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan. Ditambah beliau (bupati) jarang mengeluarkan *statement-statement*. Dalam agama sendiri (Islam), Jika pemimpin itu seorang perempuan maka banyak kemudhratannya kecuali dia bisa menguasai itu (dominan dibanding suami jika sudah berumah tangga). Apabila perempuan masih kalah dominan dibandingkan pasangannya, sebaiknya tidak memimpin karena nantinya kepemimpinannya tidak akan berjalan baik. Saya sempat mendapat cerita ketika ada seseorang hendak bertemu dengan bupati tapi bukannya mendapati bupati di tempat justru ujaran suaminya yang mengatakan bahwa, bupati saat ini tidak dapat ditemui saat ini karena alasan tertentu (capek) dan bisa mewakilkan urusan bupati melaluinya sehingga kebijaksanaan yang tercipta yaitu kebijaksanaannya (suami) bukan bupati.” (transkrip wawancara dengan Indra Kusuma, Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes)

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas maka penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai salah satu langkah untuk mengetahui apa yang akan dicari didalam penelitian ini, maka dirumuskan pertanyaannya sebagai berikut :

1. Bagaimana peran keluarga ”Dewi Sri” dalam memengaruhi kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes 2017-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis adala sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai peran keluarga “Dewi sri” dalam memengaruhi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini bagi ilmu pengetahuan untuk memperkaya khasanah ilmu sosial dan politik dalam kaitannya dengan studi mengenai bisnis dan politik di aras lokal dan studi mengenai perkembangan oligarki di aras lokal. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelengkap penelitian-penelitian terdahulu mengenai bisnis dan politik di aras lokal maupun mengenai oligarki lokal di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran bagi daerah-daerah di Indonesia bahwa sejak berlakunya implementasi otonomi daerah kekuasaan masih terpusat pada segelintir orang yang berusaha untuk mempertahankan kekayaannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai praktik bisnis dan politik, dan praktik oligarki di daerah. penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam rekrutmen pemimpin daerah.

1.5 Penelitian Terdahulu

Robert Robinson Dan Vedi R. Hadiz dalam penelitiannya yang berjudul *Ekonomi Politik Oligarki Dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan Di Indonesia*, menjelaskan mengenai terbentuknya kembali kekuasaan oligarki setelah runtuhnya masa orde baru. Dengan adanya implementasi otonomi daerah dan diberlakukannya pemilu, hal tersebut justru membuat para oligark lama lahir kembali dengan berusaha memenangkan kontestasi di pemilu di tiap daerah.

Lebih lanjut lagi, Setengah dasawarsa setelah otoritarianisme di Indonesia runtuh pada 1998, jabatan publik dan otoritas negara masih menentukan pola akumulasi dan distribusi kekayaan pribadi serta kekuatan sosial. Banyak tokoh lama tetap mendominasi bisnis dan politik di Indonesia, sementara tokoh baru terseret kedalam praktik predator. Oligarki masih mendominasi politik dan ekonomi di Indonesia.

Erwin Saputra Muhammad dalam penelitiannya yang berjudul *Tumbuhnya Oligarki Lokal : Kekuasaan Ekonomi dan Politik Tubagus Chaeri Werdana Di Kota Tangerang Selatan*. Menjelaskan bahwa Faktor terbangunnya kekuasaan Tubagus Chaeri di Tangerang Selatan terdiri dari beberapa faktor diantaranya : pertama, pembentukan kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonomi baru otomatis memiliki APBD sendiri hal ini menjadi motivasi bagi Tubagus Chaeri Wardana untuk meningkatkan kekayaannya dari APBD. Kedua, kebijakan desentralisasi melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan biaya yang sangat mahal, hal ini membuat oligark Tubagus Chaeri Werdana yang mempunyai kekayaan mempunyai kekuasaan yang lebih dibandingkan dengan anggota masyarakat yang lain.

Wasito Raharjo Djati dalam penelitiannya yang berjudul *Revivalime Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi : Dinasti Politik Di Aras Lokal* menjelaskan bahwa Gejala Familisme sebagai preferensi politik yang didasari atas penguasa yang mengangkat saudaranya sebagai upaya untuk menutupi aib kekuasaannya. Familisme sendiri turut dipengaruhi berbagai

sumber politik seperti halnya populisme, tribalisme, dan feodalisme yang membedakan karakter dinasti politik di Indonesia.

M. Faisal Husen dalam penelitiannya yang berjudul Dinasti Politik: Perebutan Kekuasaan Keluarga Ratu Atuts Chosiyah dengan Ismet Iskandar di Kabupaten Tangerang. Menjelaskan bahwa Kemenangan dinasti politik ismet atas dinasti politik ratu atut dikarenakan oleh politik .kekeluargaan.

Berikut disajikan tabel penelitian sebelumnya :

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

Nama, Judul	Teori	Metode	Hasil
Robert Robinson Dan Vedi R. Hadiz, Ekonomi Politik Oligarki Dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan Di Indoensia	Pendekatan Ekonomi Politik Klasik dan	Kualitatif	Setengah dasawarsa setelah otoritarianisme di Indonesia runtuh pada 1998, jabatan publik dan otoritas negara masih menentukan pola akumulasi dan distribusi kekayaan pribadi serta kekuatan sosial. Banyak tokoh lama tetap mendominasi bisnis dan politik di Indonesia, sementara tokoh baru terseret kedalam praktik predator. Oligarki masih mendominasi politik dan ekonomi di Indonesia.
Erwin Saputra Muhammad, Tumbuhnya Oligarki Lokal : Kekuasaan Ekonomi dan Politik Tubagus Chaeri	Teori Oligarki, Konsep Shadow State, Ekonomi Informal	Kualitatif	Faktor terbangunnya kekuasaan Tubagus Chaeri di Tangerang Selatan terdiri dari beberapa faktor diantaranya : pertama, pembentukan kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonomi baru otomatis memiliki APBD sendiri hal ini menjadi motivasi bagi Tubagus Chaeri Wardana untuk meningkatkan kekayaannya dari APBD. Kedua, kebijakan desentralisasi

Werdana Di Kota Tangerang Selatan			melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan biaya yang sangat mahal, hal ini membuat oligark Tubagus Chaeri Werdana yang mempunyai kekayaan mempunyai kekuasaan yang lebih dibandingkan dengan anggota masyarakat yang lain.
Wasito Raharjo Djati, Revivalime Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi : Dinasti Politik Di Aras Lokal	Pendekatan Budaya Politik Familisme	Kualitatif	Gejala Familisme sebagai preferensi politik yang didasari atas penguasa yang mengangkat saudaranya sebagai upaya untuk menutupi aib kekuasaannya. Familisme sendiri turut dipengaruhi berbagai sumber politik seperti halnya populisme, tribalisme, dan feodalisme yang membedakan karakter dinasti politik di Indonesia
M. Faisal Husen, Dinasti Politik: Perebutan Kekuasaan Keluarga	Dinasti politik, <i>patron-client</i> ,	Kualitatif	Kemenangan dinasti politik ismet atas dinasti politik ratu atut dikarenakan oleh politik .kekeluargaan.

Ratu Atuts Chosiyah dengan Ismet Iskandar di Kabupaten Tangerang.	dan kekuasaan elite		
---	------------------------	--	--

Dalam penelitian ini yang berjudul Relasi Bisnis dan Politik: Studi Peran Keluarga “Dewi Sri” Dalam Memengaruhi Kebijakan Kabupaten Brebes tahun 2017-2022. Mendeskripsikan mengenai peran Keluarga “Dewi Sri” dalam memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Brebes. terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana dalam penelitian ini, penulis berfokus kepada peran dari keluarga “Dewi Sri” dalam mengintervensi kebijakan secara umum seperti pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Oligarki

Oligarki merupakan sebuah konsep yang lazim digunakan dalam ilmu sosial untuk menjelaskan bentuk kekuasaan negara atau organisasi, namun pengertiannya masih menjadi bahan diskursus. Secara bahasa istilah oligarki berasal dari bahasa Yunani *oligarkhia*, yang terdiri dari kata *oligo* (sedikit) dan *arkhein* (memerintah), jadi oligarki adalah pemerintahan oleh sedikit orang. Dalam kamus *International Encyclopedia of Social Sciences* oligarki didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil. (Winters, 2011:1)

Pengertian oligarki yang paling awal merujuk pada penjelasan Aristoteles mengenai tipologi kekuasaan. Aristoteles mengatakan bahwa oligarki adalah sebuah sistem pemerintahan oleh sedikit orang kaya yang biasa disebut kaum aristokrat yang bertujuan demi kepentingan pribadi

mereka dan tanpa keadilan, (Winters, 2011:2) Penjelasan Aristoteles tentang oligarki bahwa jumlah orang yang berkuasa menjadi dasar hanya memberikan tawaran bentuk-bentuk pemerintahan yang baginya ideal dan yang mungkin bisa diterapkan oleh sebuah negara.

Pandangan lain dikemukakan oleh Robert Michels dalam Erwin Saputra (2016:23) , bagi Michels oligarki adalah sebuah konsep yang menjelaskan kecenderungan kekuasaan menjadi terkonsentrasi pada sekelompok elit yang membuat keputusan dan bertindak memiliki konsekuensi besar pada hampir pada mayoritas anggota sebuah organisasi, dan diorientasikan lebih ke arah merawat posisi kekuasaan mereka ketimbang melihat kepentingan anggota dari organisasinya. Proses yang dijelaskan Michels terjadi dalam partai politik, organisasi dan masyarakat modern meskipun mekanisme yang digunakan organisasi tersebut adalah demokrasi.

Penjelasan Michels dalam hal ini mengenai oligarki belum memuaskan, karena penggunaan istilah oligarki dan elit masih tumpang tindih, tesis Michels yang mengatakan di semua masyarakat dan semua organisasi tunduk pada hukum besi oligarki justru kelihatannya lebih menawarkan analisis bagaimana kaum elit mendominasi sebuah organisasi ketimbang menjelaskan oligarki itu sendiri. Namun pandangan Aristoteles, Michels, juga perintis teori elit seperti Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca menjadi pijakan dalam kepustakaan ilmu politik untuk menjelaskan dominasi kekuasaan minoritas (Winters, 2011:3).

Ilmuan politik seperti Joel S. Migdal juga dalam studinya tentang kekuasaan *strongmen* di duni ketiga memperkaya kepustakaan ilmu politik soal kekuasaan elit dan oligarki. Studi Migdal soal *strongmen* membahas hubungan masyarakat dan negara yang mengatakan terdapat dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh anggota dari masyarakat yang memiliki basis kekuasaan yang lebih dibanding anggota masyarakat yang lebih luas, sehingga membuat kemampuan kepemimpinan negara menjadi tidak efektif.

Strongmen adalah aktor politik yang memiliki latar beragam, bisa seorang tuan tanah, mafia, pembisnis, preman dan kekuatan marga atau dinasti. Fokus Migdal bukan pada latar belakang *strongmen*, tapi *strongmen* dengan aturan dan sistem keadilan yang dibangunnya menyerupai negara membuat pemimpin negara tidak bisa menjalankan kebijakan secara efektif sehingga *strongmen* dapat menguasai sumberdaya negara seperti tanah, air, dan kontrak negara (Migdal, 2004:67).

Berbeda dengan Migdal, John T Sidel menawarkan kosep bosisme untuk menjelaskan aktor dalam masyarakat yang memiliki kemampuan yang lebih dari anggota yang lebih luas. Tapi bosisme pada beberapa negara yang ditemui justru tidak menghambat kebijakan yang telah dibuat oleh pemimpin negara, sehingga pada beberapa negara mampu menjalani proses industrialisasi dan demokratisasi. (Sidel, 2005:75)

Antara *strongman* dan bosisme bertujuan sama, yakni aktor yang bertujuan menguasai sumberdaya yang dimiliki negara. Tapi siapa dan jenis sumberdaya kekuasaan seperti apa yang dimiliki *strongman* dan bosisme masih menjadi persoalan kalau dimasukkan ke dalam kekuasaan oligarki dan elit, karena fokus dari Migdal dan Sidel hanya melihat kemunculan agen dalam masyarakat yang bisa saja seorang tuan tanah, pengusaha, mafia, kekuatan marga atau keluarga yang lebih kuat kekuasaannya dibanding penguasa negara untuk menguasai sumberdaya negara.

Dalam Jeffrey S. Winters (2011:10), oligarki didefinisikan sebagai “bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan minoritas kecil”. Tetapi jika konsep dari oligarki hanya diartikan sebagai penguasaan minoritas terhadap mayoritas, maka hal tersebut dirasa kurang cukup mewakili. Bila konsep oligarki didasarkan pada hal yang demikian, maka setiap kekuasaan, pengaruh, atau pemerintahan, yang menempatkan minoritas dalam memimpin, maka dapat disebut sebagai oligarki. Sehingga apa yang disebut sebagai oligarki menurut Winters penting untuk menempatkannya kedalam dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki memiliki dasar kekuasaan-kekayaan material yang sangat susah untuk dipecahkan dan diseimbangkan. Kedua, oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya berposisi minoritas dalam suatu komunitas. Dengan demikian kekuasaan yang oligarkis harus didasarkan pada bentuk kekuasaan yang susah dipecahkan dan jangkauannya harus sistemik.

Menurut Winters (2011:11), teorisasi oligarki dimulai dari adanya fakta bahwa ketidaksetaraan material yang ekstrem menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrem pula. Meskipun dalam demokrasi, kedudukan dan akses terhadap proses politik dimaknai setara, akan tetapi kekayaan yang besar ditangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik pada golongan tersebut. Klaim ini didasarkan pada distribusi sumberdaya material diantara anggota komunitas politik, demokrasi, atau sistem lainnya, yang memiliki pengaruh besar pada kekuasaan. Semakin tidak seimbang distribusi kekayaan material, semakin besar kekuasaan dan pengaruh orang kaya dalam motif dan tujuan politiknya. Dengan demikian, ketidaksetaraan yang besar dalam kekayaan menghasilkan ketidaksetaraan kekuasaan dan pengaruh politik.

Klaim teoritik tersebut didasarkan pada hubungan yang erat antara uang (kekayaan) dan kekuasaan yang menyejarah dalam sistem politik manusia. Studi mengenai Oligark dan Oligarki memusatkan perhatian pada kuasa kekayaan dan politik yang spesifik di sekitar kuasa tersebut. Penekanannya ada pada dampak politik kesenjangan material terhadap “kesenjangan kondisi” yang membuat bentuk-bentuk kekuasaan dan eksklusi minoritas oligarkis berbeda dengan yang lainnya. Untuk itu, menurut Winters (2011:8), teori Oligarki harus menjelaskan bagaimana kekayaan yang terkonsentrasi menciptakan kapasitas, motivasi, dan masalah politik tertentu bagi mereka yang memilikinya. Selain juga harus peka terhadap

bagaimana dan mengapa politik seputar kekayaan sebagai kekuasaan telah berubah seiring perkembangan waktu.

Berdasarkan fakta demikian, Winters (2011:8) memulai penjelasannya mengenai Oligarki dari apa yang dimaksud dengan Oligark. Winters (2011:8) mendefinisikan Oligark sebagai “pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya”. Berdasarkan definisi itu, terdapat tiga hal yang saling bersangkutan paut, antara lain, pertama, kekayaan adalah bentuk kekuasaan yang material berbeda dengan sumber daya kekuasaan lain yang berpusat pada minoritas; kedua, penguasaan dan pengendalian sumber daya itu ditujukan untuk kepentingan pribadi; dan ketiga, definisi Oligark tetap konsisten di berbagai zaman dan kasus.

Winters (2011:9) memperkenalkan konsep “pertahanan kekayaan”.Sepanjang perjalanan sejarah, kekayaan material yang terkonsentrasi pada minoritas selalu mengundang ancaman dari pihak luar yang ingin menguasai atau mendistribusi ulang kekayaan tersebut. Ini dimaknai sebagai pengambilalihan sumber daya material dari Oligark. Oleh karena itu, maka dinamika politik para Oligark selalu berhubungan dengan ancaman tersebut, dan bagaimana Oligark mempertahankannya. Pertahanan kekayaan ini mencakup dua komponen, yaitu pertahanan harta dan pertahanan pendapatan.Winters (2011:10) memberikan definisi Oligarki sebagai sebuah sistem yang merujuk pada “politik pertahanan

kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (Oligark)”. Pada konsep ini, Winters mengetengahkan aspek penting dari Oligarki, yaitu kekayaan menjadi sumber daya material bagi kekuasaan para Oligark dan dinamika politik pertahanannya yang dikelola secara politis.

1.6.2 Good Governance

Dwiyanto (dalam Safrijal dkk, 2016:179) Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang Good Governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan Good Governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik Good Governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.

Sugandi (dalam Safrijal dkk, 2016:179) birokrasi pada sektor publik, pada dasarnya di hadirkan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Meskipun birokrasi publik memiliki cirri-ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis, tetapi dalam menjalankan misi, tujuan dan programnya menganut prinsip prinsip efisiensi, efektivitas, dan menempatkan masyarakat sebagai stakeholder, yang harus di layani secara optimal. Layanan publik merupakan hak masyarakat yang pada dasarnya mengandung prinsip: sederhana, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, dan

prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Pemerintah Daerah. Yang mengatur tentang Penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan asas tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan "tata pemerintahan yang baik" adalah proses penciptaan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi antar strata pemerintahan dan antara pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan swasta/dunia usaha) dalam suatu tata nilai yang baik.

Terdapat tiga terminologi yang masih rancu dengan istilah dan konsep good Governance, yaitu: Good Governance (tata pemerintahan yang baik), Good Government (pemerintahan yang baik), dan Clean Governance (pemerintahan yang bersih). Untuk lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai atas Good Governance, maka adapun beberapa pengertian dari Good Governance, antara lain :

1. Menurut Bank Dunia (World Bank). Good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Adisasmita,2011).
2. Menurut UNDP (United National Development Planning). Good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan

administratif ingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. (Adisasmita, 2011).

Sementara itu UNDP dalam (Rosidin,2010:179) berorientasi meliputi participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif pada antara lain:

1. Partisipasi (participation)

Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat di lakukan secara langsung ataupun melalui institusi intermediasi.

2. Penegakan Hukum (Rule of law)

Good Governance di laksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi anarki. Tanpa penegakan hukum, orang secara bebas berupaya mencapai tujuannya sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan Good Governance adalah menghubungkan system hukum yang sehat, baik perangkat lunak (software), perangkat kerasnya (hardware) maupun sumberdaya manusia yang menjalankan sistemnya (human ware)

3. Transparansi (Transparancy)

Salah satu karakteristik Good Governance adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan itu mencakup semua aspek aktifitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana public, sampai pada tahapan evaluasi.

4. Daya Tanggap (Responsiveness)

Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan para pemegang saham (stake holder). Upaya peningkatan daya tanggap tersebut, terutama di tujukan pada sector publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan oleh sector public, secara periodik perlu di lakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen.

5. Berorientasi pada consensus (consensus orientation)

Kegiatan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat pada dasarnya merupakan aktifitas politik, yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan consensus. Dalam Good Governance, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih di utamakan berdasarkan consensus, yang di lanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan consensus yang telah di putuskan bersama. Consensus bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukan lah hal yang abaru, karena nilai dasar kita

dalam memecahkan persoalan bangsa adalah melalui musyawarah untuk mufakat.

6. Keadilan (equity)

Melalui prinsip Good Governance, setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga Negara berbeda-beda, sector publik harus memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiring sejalan.

7. Efisiensi dan Efektifitas (Efficiency and Effectiveness)

Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam pencatutan dunia, kegiatan ketiga domain dan Governance harus mengutamakan efektifitas dan efesiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektifitas dan efisiensi terutama di tujukan pada sector public karena sector ini menjalankan aktifitasnya secara monopolistic. tanpa kompetisi, tidak akan ada efisiensi.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Setiap aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggung gugat dan tanggung jawab tidak hanya di berikan kepada atasan saja, tetapi juga pada pemegang saham (stake holder), yaitu masyarakat luas, secara teoritis, akuntabilitas dapat di bedakan menjadi lima macam, yaitu: a. Akuntabilitas organisasi

b. Akuntabilitas legal

c. Akuntabilitas politik

d. Akuntabilita professional

e. Akuntabilitas moral

9. Visi Strategis (Strategic vision)

Dalam era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam Good Governance harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu, suatu bangsa dan Negara akan mengalami ketinggalan. visi itu, dapat di bedakan antara visi jangka panjang (long term vision) antar 20 samapai 25 tahun, serta visi jangka pendek (short term vision) sekitar 5 tahun.

Arti Good dalam Good Governence mengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. berdasarka pengertian ini, good governance berorientasi pada, yaitu pertama orientasi ideal negara yang di arahkan pada pencapaian tujuan nasional, dan yang kedua pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional (Adisasmita.2011:23)

Rosidin (dalam Safrijal dkk, 2016:180) terselenggaranya Good Governence merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan anspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu di perlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.6.3 Definisi Konsep

Dalam rangka memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian dan mengacu pada rumusan masalah, tujuan, dan teori yang sudah disusun, maka peneliti menuangkan spesifikasi-spesifikasi sebagai pembatas agar permasalahan tidak melebar dan tetap pada tujuan awal. Spesifikasi tersebut dituangkan dalam bentuk konsep-konsep atau alternatif-alternatif yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam menyusun panduan pengumpulan data. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

1.6.3.1 Peran Keluarga “Dewi Sri”

Peran keluarga “Dewi Sri” merupakan sebuah bentuk usaha yang dilakukan oleh keluarga “Dewi Sri” untuk memainkan peran dalam Pemerintahan Kabupaten Brebes. Peran keluarga “Dewi sri” juga dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang diharapkan oleh keluarga “Dewi sri” karena memiliki kedudukan (strata sosial) yang tinggi dalam masyarakat. Peran keluarga “Dewi Sri” dalam konsep penelitian ini mengacu kepada perilaku ataupun usaha yang dilakukan oleh keluarga “Dewi Sri” dalam

Pemerintahan Kabupaten Brebes meskipun tidak secara langsung berada dalam Pemerintahan.

1.6.3.2 Memengaruhi Kebijakan

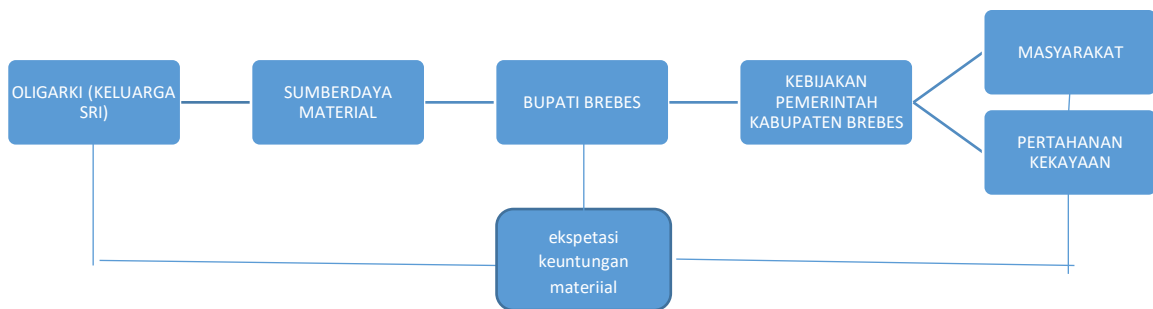
Memengaruhi kebijakan dalam definisi konsep ini diartikan sebagai bentuk usaha untuk dapat memengaruhi segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok dari kebijakan yang telah dibuat. Memengaruhi kebijakan juga dapat diartikan sebagai penggunaan pengaruh atau daya yang ada (material) kepada kekuasaan untuk membuat kebijakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang/kelompok yang memberi pengaruh.

1.7 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran, penulis mengambil teori yang dikemukakan oleh Winters mengenai konsep oligarki untuk menjelaskan kasus yang terjadi di Kabupaten Brebes. Winters (2011:10) memberikan definisi Oligarki sebagai sebuah sistem yang merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (Oligark). Pada konsep ini, Winters mengetengahkan aspek penting dari Oligarki, yaitu kekayaan menjadi sumber daya material bagi kekuasaan para Oligark dan dinamika politik pertahanannya yang dikelola secara politis. Berdasarkan penjelasan mengenai teori oligarki yang dikemukakan oleh Winters, penelitian ini merujuk kepada bagaimana keluarga Dewi Sri

mempertahankan kekayaan dan kekuasaan melalui penempatan Idza Priyanti sebagai Bupati Kabupaten Brebes. Akan lebih mudahnya dijelaskan melalui gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Peran Keluarga “Dewi Sri” dalam Kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes



Sumber : Jeffery A. Winters (2011) gambar diolah oleh penulis

1.8 Metode Penelttian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu masalah/keadaan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta yang ada di lapangan. Hasil penelitian ditekankan kepada gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang sedang diteliti.

Penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia terhadap kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiliahannya. (Lexy Meolong, 2001)

Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna sebuah permasalahan dibanding generalisasi.

Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus yaitu Salah satu dari jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell adalah studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Adapun yang membedakan penelitian dengan pendekatan studi kasus dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang lain terdapat pada kedalaman analisisnya pada sebuah kasus tertentu yang lebih spesifik. Analisis data juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu di suatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian menetapkan tempat atau wilayah dimana penelitian ini akan dilaksanakan. Judul dari penelitian ini adalah RELASI BISNIS DAN POLITIK DI BREBES dengan Studi Kasus Peran Keluarga Dewi sri Dalam memengaruhi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes sehingga lokus atau tempat/wilayah yang diambil adalah berdasarkan penelitian di atas yakni di Kabupaten Brebes, Khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

1.8.3 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri, selanjutnya menurut Sugiyono (2010:223) Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya adalah bahwa segala sesuatu belum memiliki bentuk pasti. Masalah focus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan jelas ini, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

pada penelitian tentang relasi bisnis dan politik di Brebes studi peran keluarga dewi sri dalam kebijakan pemerintah Kabupaten Brebes menggunakan jenis data sebagai berikut :

1. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data yang diperoleh melalui pertanyaan-

pertanyaan dari wawancara, dan observasi/pengamatan secara langsung. Data primer dalam penelitian ini dapat berupa hasil wawancara kepada Bupati Brebes, Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes, Kepala Dinperwaskim Kabupaten Brebes, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Brebes, Kontraktor, dan Kepala bagian Umum Setda Brebes.

2. Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa yang sudah ada sebelumnya berupa catatan majalah, surat kabar, dokumen, laporan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa tabel, laporan dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Brebes.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara Mendalam

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.

Tabel 1.2 Kelompok Informan dan Hasil yang Diharapkan

No	Kelompok Informan	Hasil yang Diharapkan
-----------	--------------------------	------------------------------

1.	Indra Kusuma (Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes)	Informasi mengenai peran keluarga “Dewi Sri” dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh Idza Priyanti, keluarga yang paling berperan dalam setiap kebijakan yang dibuat Bupati.
2.	Idza Priyanti (Bupati Kabupaten Brebes)	Informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat selama menjabat dan latarbelakang menjabat sebagai Bupati.
3.	Warsito Eko Putro (Kepala Bagian Umum Setda Brebes)	Informasi mengenai kebijakan secara umum yang dikeluarkan oleh Bupati dan siapa saja yang memengaruhi Bupati dalam pengambilan kebijakan.
4.	Dodi (Kontraktor Kabupaten Brebes)	Informasi mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
5.	Sutaryono (Kepala dinas Dinperwaskim Kab. Bebes)	Informasi mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
6.	Ahmad Mahmum (Kepala Bagian Kesejahteraan Rayat Setda Brebes)	Informasi mengenai pengadaan Bus pada pengangkutan jamaah haji setiap tahunnya di Kabupaten Brebes.

2. Observasi

Merupakan upaya pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperkuat dan meyakinkan hasil wawancara dan fenomena selama proses penelitian dilakukan.

1.8.5 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data langsung, artinya analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data dan terus berlanjut sampai akhir penelitian.

Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna (Jonathan Sarwon, 2006:239). Sehingga dalam hal ini analisa data merupakan proses pengolahan data dengan mengurutkan alam pola tertentu sehingga lebih mudah dimengerti dan dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan model analisis Interaktif, yaitu informasi yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan, diteliti dan dipelajari sebagai suatu rangkaian utuh.

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Creswell, 2014:274). Dalam teknik analisis data terdapat empat tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan data yang telah diperoleh,

kemudian melakukan sortir data, lalu *men-display* data yang telah disortir, dan membuat kesimpulan secara vertikal mengenai analisis yang telah dilakukan.

1.8.6 Analisis Data Selama Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mewawancarai informan yang menjadi sumber data. Hasil wawancara dicatat kemudian ditelaah dan dikembangkan dalam bentuk rangkuman.

Setelah data terkumpul, ada beberapa tahap yang dilakukan untuk memproses data, antara lain: memeriksa kelengkapan dan kelayakan data untuk mendapatkan data yang akurat, apabila belum lengkap dapat dilakukan pengumpulan data ulang langsung.

1. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan dan kelayakan data untuk mendapatkan data yang valid dan akurat. Apabila belum lengkap, dapat dilakukan pengumpulan data secara ulang langsung kepada narasumber yang bersangkutan.
2. *Coding*, yaitu memberikan kode-kode pada hasil wawancara, observasi untuk mengklasifikasikan jawaban dan informasi yang berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah dibuat untuk mempermudah tahap berikutnya.
3. *Simpulan*, yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan, dianalisis untuk mendapatkan makna dari pokok kajian.

1.8.7 Uji Keabsahan Data

Tahap selanjutnya adalah uji dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Validasi adalah salah satu kekuatan khas dari penelitian kualitatif di mana laporan tersebut yang dihasilkan melalui penghabisan waktu yang panjang di lapangan, deskripsi yang tebal serta terperinci, dan kedekatan peneliti dengan para partisipan dalam studi tersebut menambah nilai (Cresswell, 2014:285).

1.8.8 Penyimpulan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis pengolahan data penelitian, selanjutnya dilakukan suatu penarikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada tahap ini, juga diajukan adanya saran-saran. Saran-saran ini diajukan baik kepada peneliti atau calon peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mendalami studi mengenai topik penelitian yang sama dan serupa.

1.8.9 Penyajian Hasil Analisis Data

Penyajian hasil analisis data pada penelitian ini adalah deskripsi. Deskripsi adalah menyajikan hasil analisis data dengan cara menjelaskan dan menguraikan atau mendeskripsikan obyek penelitian seakan-akan ada dihadapan pembaca.